ASLI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Perihal : **JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERKARA NOMOR: 01-08-20/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) PROVINSI KALIMANTAN BARAT KABUPATEN KUBU RAYA DAPIL 2**

DITERIMA DARI ....Termohon....
NOMOR 01-08-20/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : Rabu
TANGGAL : 10 Juli 2019
JAM : 08.53 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Elly Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **Sutikno, S.H., M.H**
20. **Tatang Rachman, S.H**

9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rd. Novaryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Perkara Nomor 01-08-20/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan **PEMOHON** (Partai Keadilan Sejahtera), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	**Mahkamah Konstitusi**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana telah pula dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Perkara PHPU Pemilihan PILPRES 2019.

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu,** dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**.

2. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
3. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

   Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diduga

terjadinya Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Dengan berlakunya Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan untuk memeriksa Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif menjadi kewenangan dari **BAWASLU** dan **MAHKAMAH AGUNG;**

4. Bahwa dengan demikian permohonan **PEMOHON** untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- BAhwa berdasarkan fakta hukum pula, kuasa hukum **PEMOHON** "DEVIYANTI DWININGSIH,SH.,MH., Dkk" Tidak melampirkan surat kuasa dari **PEMOHON**. Oleh karena demikian, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara Permohonan Sengketa PHPU ***a quo. (ad Informadum AP3 Nomor 01-08-20/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019).***

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON,** sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON;**
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON,** kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON;**
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

1.1. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA

DAPIL KABUPATEN KUBU RAYA 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KUBU RAYA (BERDASAKAN DB1-DPRD)

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK				SELISIH
		TERMOHON	KURSI	PEMOHON	KURSI	
1.	NASDEM	1.100	1	1.100	1	-
2.	DEMOKRAT	5.768	1	5.768	1	-
3	PDIP	5.617	1	5.617	1	-
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	5.011	1	5.011	1	-

5	**PPP**	**3.237**	**1**	**3.136**	**0**	**101**
6	**PARTAI KEADILAAN SEJAHTERA**	**3.224**	**0**	**3.225**	**1**	**1**
			5		5	102

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, **TERMOHON** akan menyampaikan persandingan perolehan suara di tingkat Kabupaten/kota yang benar menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1.1.1 TABEL SANDINGAN TERMOHON

NO	DAPIL/KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT			
		PKS		PPP	
		PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1	DAPIL 2 / KECAMATAN SUNGAI RAYA	3.225	**3.224**	3116	**3.237**
JUMLAH		3.225	**3.224**	3.116	**3.237**

(Vide Bukti DB1 KPU dan DA1 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya – T.023– T.009 KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara sebanyak 102 suara di atas, **TERMOHON** akan menyampaikan persandingan di setiap TPS yang dipersoalkan oleh **PEMOHON**, yaitu sebagai berikut:

PARTAI	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			PEMOHON	TERMOHON	
PKS	DESA MADU SARI	10	108	107	1 (-)
PPP	DESA MADU SARI	10	19	38	19 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	4	0	7	7 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	9	0	50	50 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	15	14	15	1 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	17	48	49	1 (+)
PPP	DESA SUNGAI ASAM	33	0	23	23 (+)

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, **TERMOHON** akan menyampaikan persandingan perolehan suara di tinggkat Kabupaten/kota yang bener menurut TERMOHON adalah:

TABEL SANDINGAN TERMOHON ;

NO	KECAMATAN/ DESA/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT									
		PKS					PPP				
		PEMOHON	TERMOHON				PEMOHON	TERMOHON			
			C1 PLANO	C1-HOLOGRAM	DAA1-PLANO	DAA1			C1-HOLOGRAM	DAA1-PLANO	DAA1
1	KECAMATAN SUNGAI RAYA										
	1. MADU SARI										
	TPS 10	108	109	**107**	**107**	**107**					
	TPS 10						19		**38**	**38**	**38**
	2. SUNGAI ASAM										
	TPS 4						0		**7**	**7**	**7**
	TPS 9						0		**50**	**50**	**50**
	TPS 15						14		**15**	**15**	**15**
	TPS 17						48		**49**	**49**	**49**
	TPS 33						0		**23**	**23**	**23**

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1 Desa Madu Sari dan Sungai Agam Kabupaten Kubu Raya – Bukti Surat T.009 dan T.008 KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

Jawaban/Bantahan **TERMOHON** atas Dalil-Dalil yang diajukan oleh **PEMOHON**

1. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan **PEMOHON** pada halaman 9 huruf b mengenai terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain (PPP) di Desa Madu sari TPS 10 sebanyak 19 suara dikarenakan salah menempatkan angka jumlah suara partai dan suara semua caleg yang seharusnya ditulis pada kolom B namun ditulisnya pada kolom A2 pada Caleg No.5 atas Nama Feri Anggariawan akibatnya terjadi pengurangan pada Fom DAAI-DPRD Desa Madu Sari sehingga jumlah suara PPP menjadi 38 suara, atas kekeliruhan ini KPPS telah mengakui telah melakukan kesalahan input penjumlahan hal ini sebagaimana diterangkan oleh KPPS TPS 10 Desa Madu Sari sebagai mana pernyataan tertanggal 11 Mei 2019, bahwa atas kekeliruan tersebut sehingga pada rekapitulasi di tingkat PPK semua angka tersebut di jumlahkan pada kolom B Form DAA1-DPRD Desa Kubu raya adalah **tidak benar. Bahwa Merupakan Fakta Hukum,** Perolehan suara Partai PPP di TPS 10 yang benar adalah sebanyak 19 suara, sesuai dengan Formulir Model C1 Hologram,DAA1, DA1, DB1; ***(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.10 Desa Madu Sari Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.009, T.008 dan T.001- KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)***

2. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan **PEMOHON** pada halaman 9 huruf c adanya penambahan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 04 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat adalah sama;

   - **Bahwa Merupakan Fakta Hukum,** sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak sebanyak 7 (tujuh) suara; di TPS 04 Desa Sungai Asam kecematan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat .

     (Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.04 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.009,T.008,dan T.002 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

3. Bahwa sebagaimana dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf e adanya penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara dari 14 suara menjadi 15 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 15 Desa Sungai

Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Desa Sungai Asam TPS 15 sebanyak 1 suara adalah **tidak benar.**

- **Bahwa Merupakan Fakta Hukum,** sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 15 (lima belas) suara;

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.15 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.008 dan T.004 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

4. Bahwa dalil Perbaikan Permohonan Pemohon pada halaman 10 huruf f adanya penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara dari 47 suara menjadi 48 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 17 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat adalah **tidak benar**;

- **Bahwa merupakan Fakta Hukum,** sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara;

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.17 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.008,T.005 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

5. Bahwa sebagaimana dalil **PEMOHON** dalam Perbaikan Permohonan pada halaman 10 huruf g adanya penambahan perolehan suara sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara dari 0 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan di TPS 33 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Barat **tidak benar**;

- **Bahwa Merupakan Fakta Hukum,** sesuai dengan Formulir Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota (PLANO), dan C.1-KPU HOLOGRAM serta berdasarkan DAA1-KPU DPRD Kabupaten/Kota adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara.

(Vide Bukti DA1 Kecamatan Sungai Raya. DAA1,C1 TPS.33 Desa Sungai ASam Kabupaten Kubu Raya - Bukti Surat T.008,T.006 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)

6. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam Permohonan *a quo* angka 1 sampai 10 halaman menyatakan adanya kesalahan dan ketidak sesuaian Rekapitulasi yang dilakukan **TERMOHON** Pada Formulir C1-DPRD yang dimiliki oleh **PEMOHON** dikarenakan adanya pengurangan suara pada **PEMOHON** sebanyak 1 suara di TPS 10 Desa Madu Sari dan penambahan suara pada Partai PPP di Kecematan Sungai Raya Desa Madusari TPS 10,Desa Sungai Asem TPS 10, TPS 9, TPS 15, TPS 17 dan TPS 33 mengenai adanya penambahan perolehan suara pada Partai PPP sebanyak 101 hasil rekapitulasi di tingkat Kelurahan antara DAAI-DPRD **TERMOHON** dengan C1 **PEMOHON** terdapat selisih 102 suara untuk Partai PPP sehingga terjadi Penambahan 1 suara untuk sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :

   - Dalil pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kubu Raya 2 yang meliputi **:**

     TPS 10 Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya;

     TPS 4 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

     TPS 9 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

     TPS 15 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

     TPS 17 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya;

     TPS 33 Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya.

     telah dijawab oleh **TERMOHON** satu persatu jawaban/Bantahan dari point 1 – 5 diatas, dimana **TERMOHON** telah melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.

7. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai diatas kiranya memadai untuk menunjukan bahwa TERMOHON dalam batas – batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01:46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **(Vide Bukti T.028,T.006 - KUBU RAYA 2 –PKS-01-08-20)**

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA

DPRD) DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUBU RAYA DAPIL 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PPP	3.237
2.	PKS	3.224

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat **TERMOHON**,
Kuasa,

1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
7. **Gian Budi Arian, S.H**
8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
9. **Candra Kuspratomo, S.H**
10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
13. **Ferdri Berdona, S.H**
14. **Pansauran Ramdani, S.H**
15. **Syafran Riyadi, S.H**
16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
17. **Ely Sunarya, S.H**
18. **Ani Yusriani, S.H**
19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
20. **R. Tatang Rachman, S.H**
21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
22. **Rr. Novarryana Laras D, S.H**
23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**